



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN



**TNP2K**  
TIM NASIONAL  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

# Situasi Permasalahan Kesejahteraan dan Upaya Mengatasinya

---

Agenda Rapat Pleno  
TNP2K Dipimpin oleh  
Wakil Presiden Republik Indonesia

Februari 2016





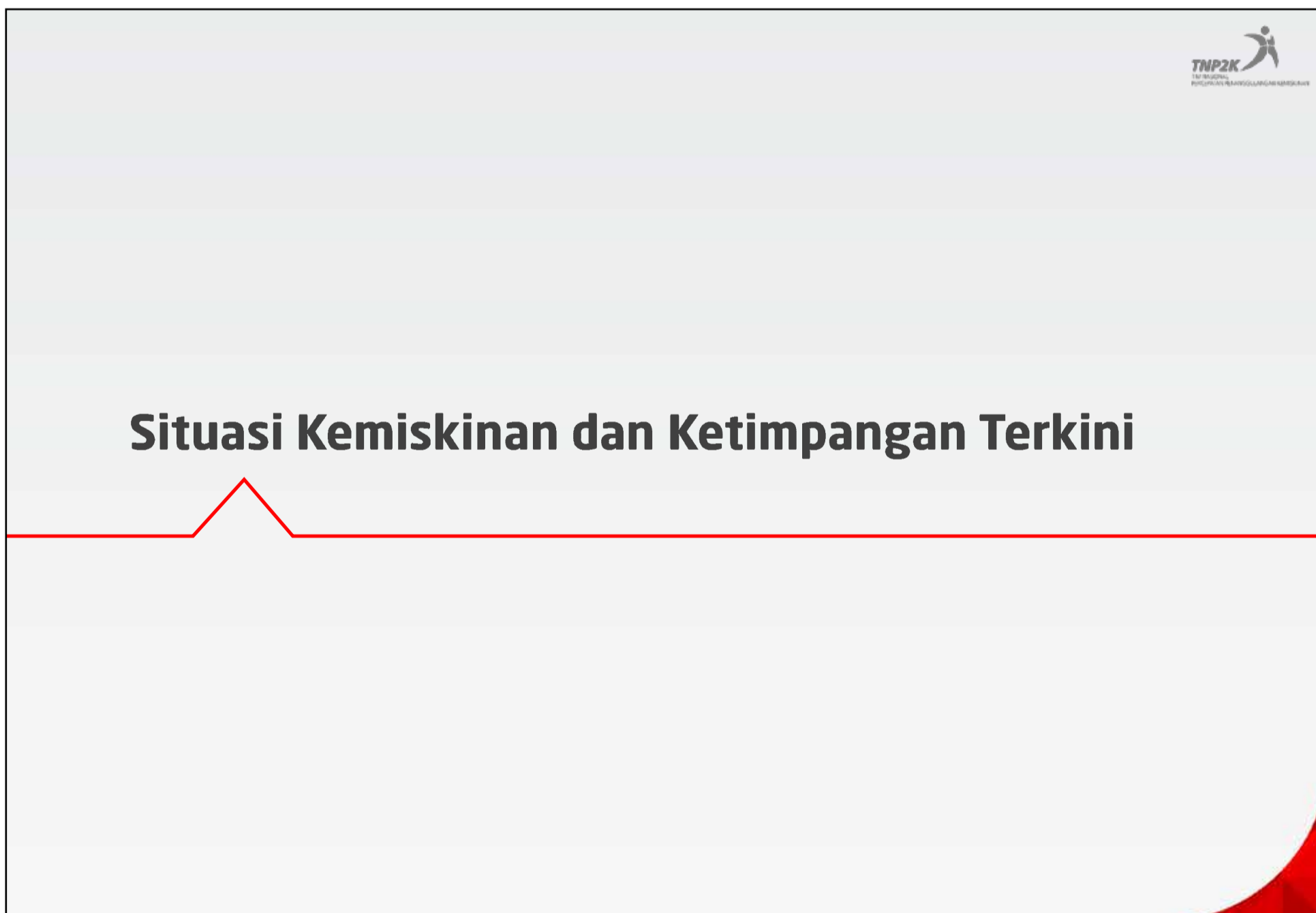
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

**TNP2K**  
TIM NASIONAL  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

# Situasi Permasalahan Kesejahteraan dan Upaya Mengatasinya

Agenda Rapat Pleno TNP2K Dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia

Februari 2016



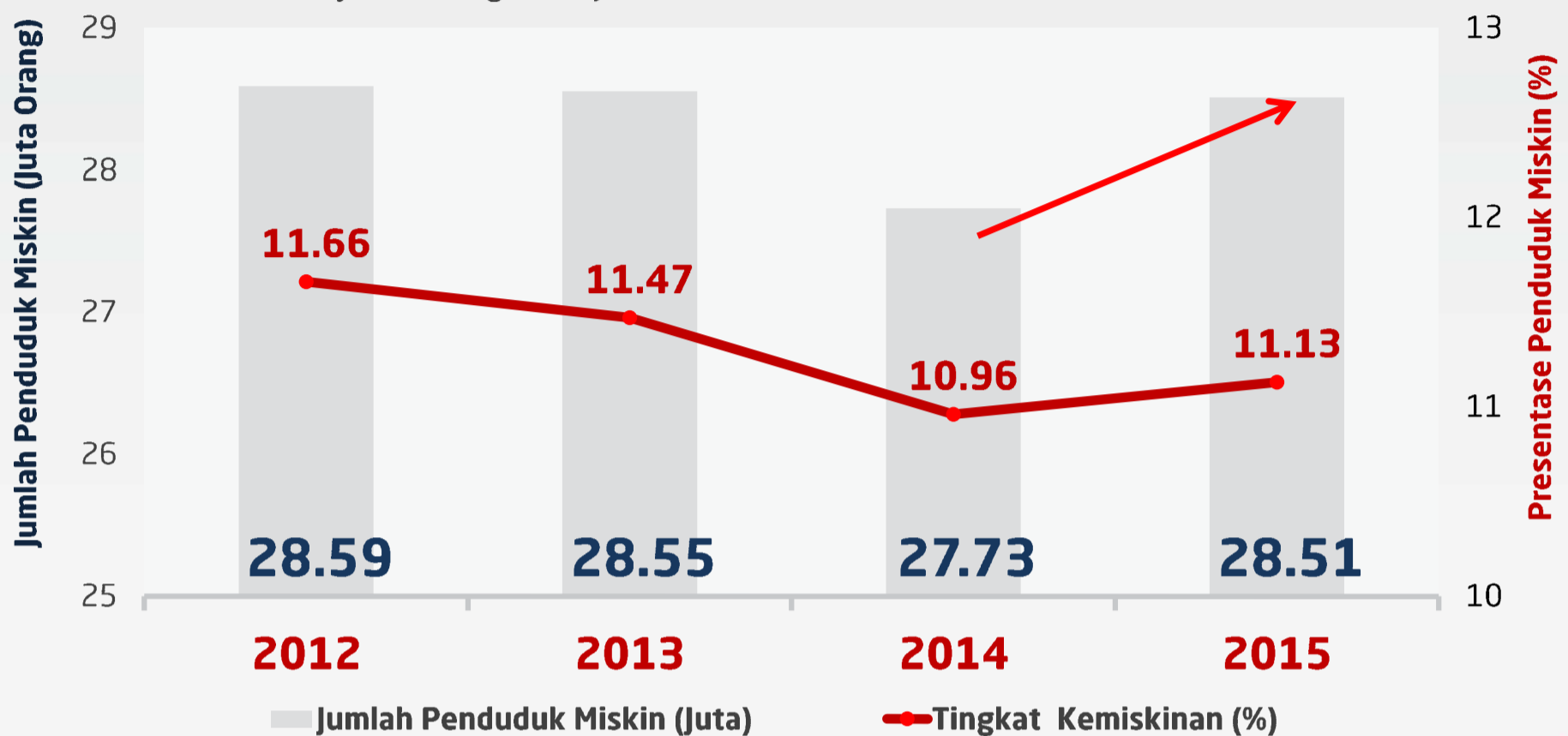
**TNP2K**  
TIM NASIONAL  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## Situasi Kemiskinan dan Ketimpangan Terkini



## Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin 2012-2015

Terjadi Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin Dalam 1 Tahun Terakhir



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016; Berdasarkan Data Susenas Bulan September

3

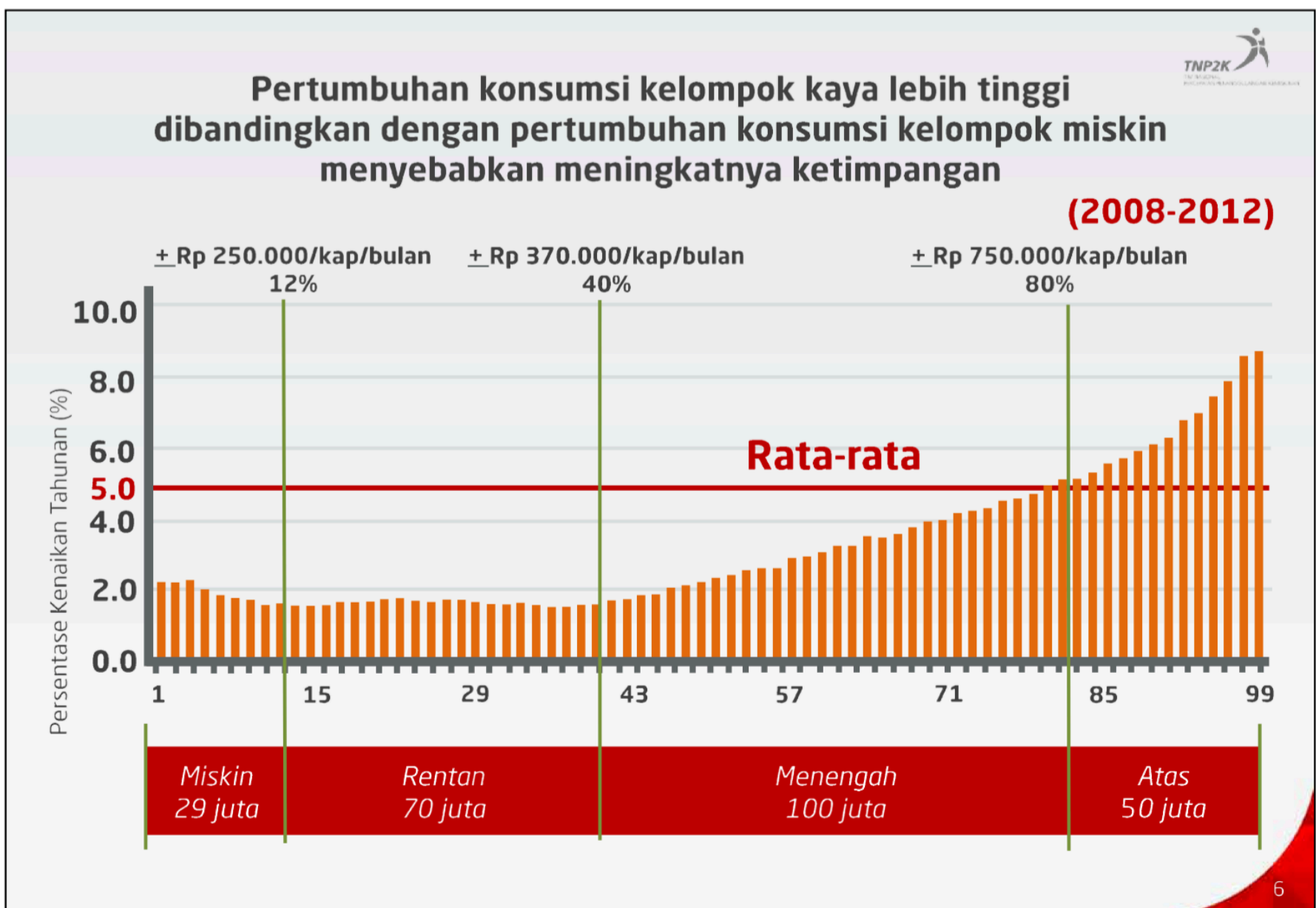
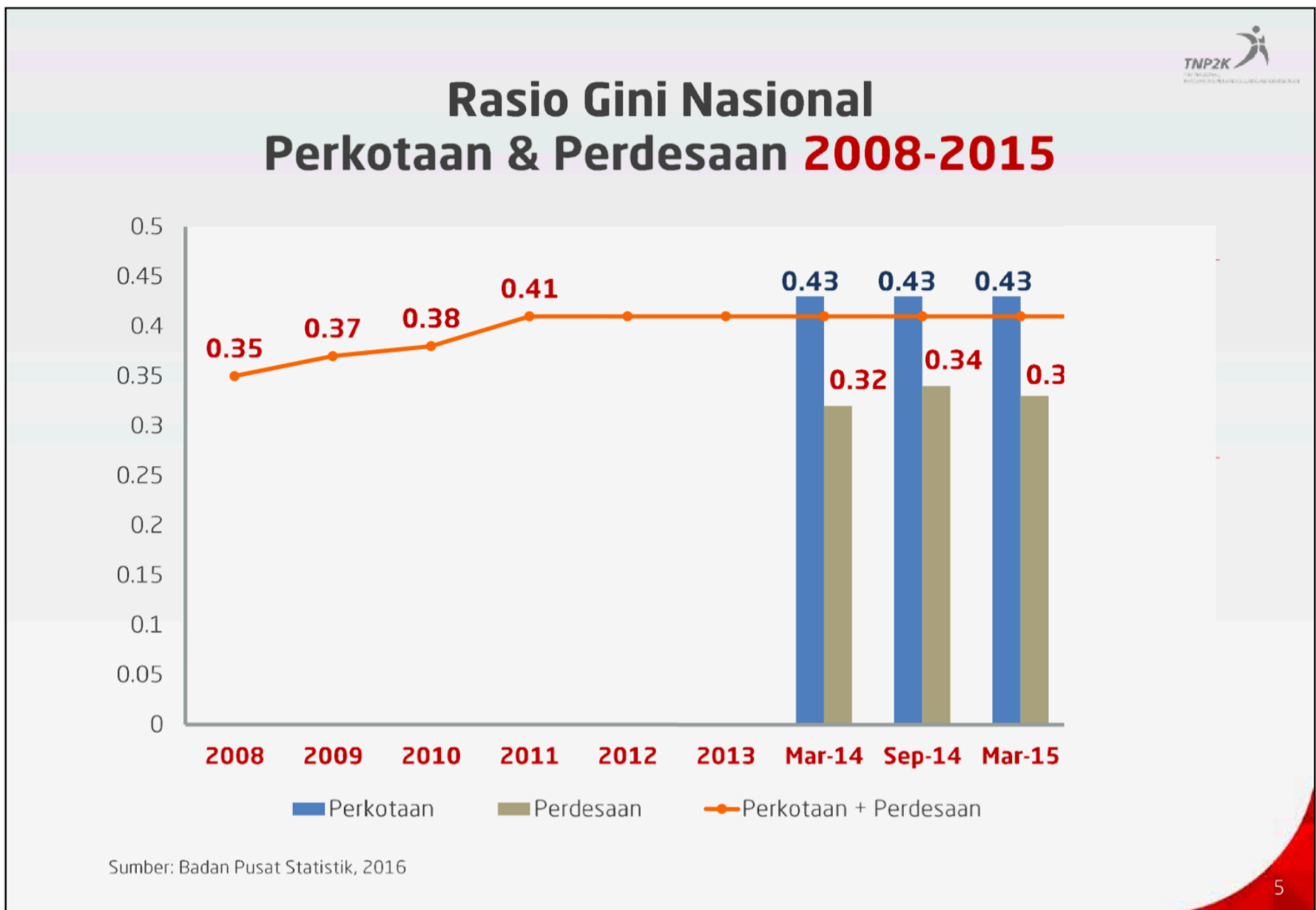


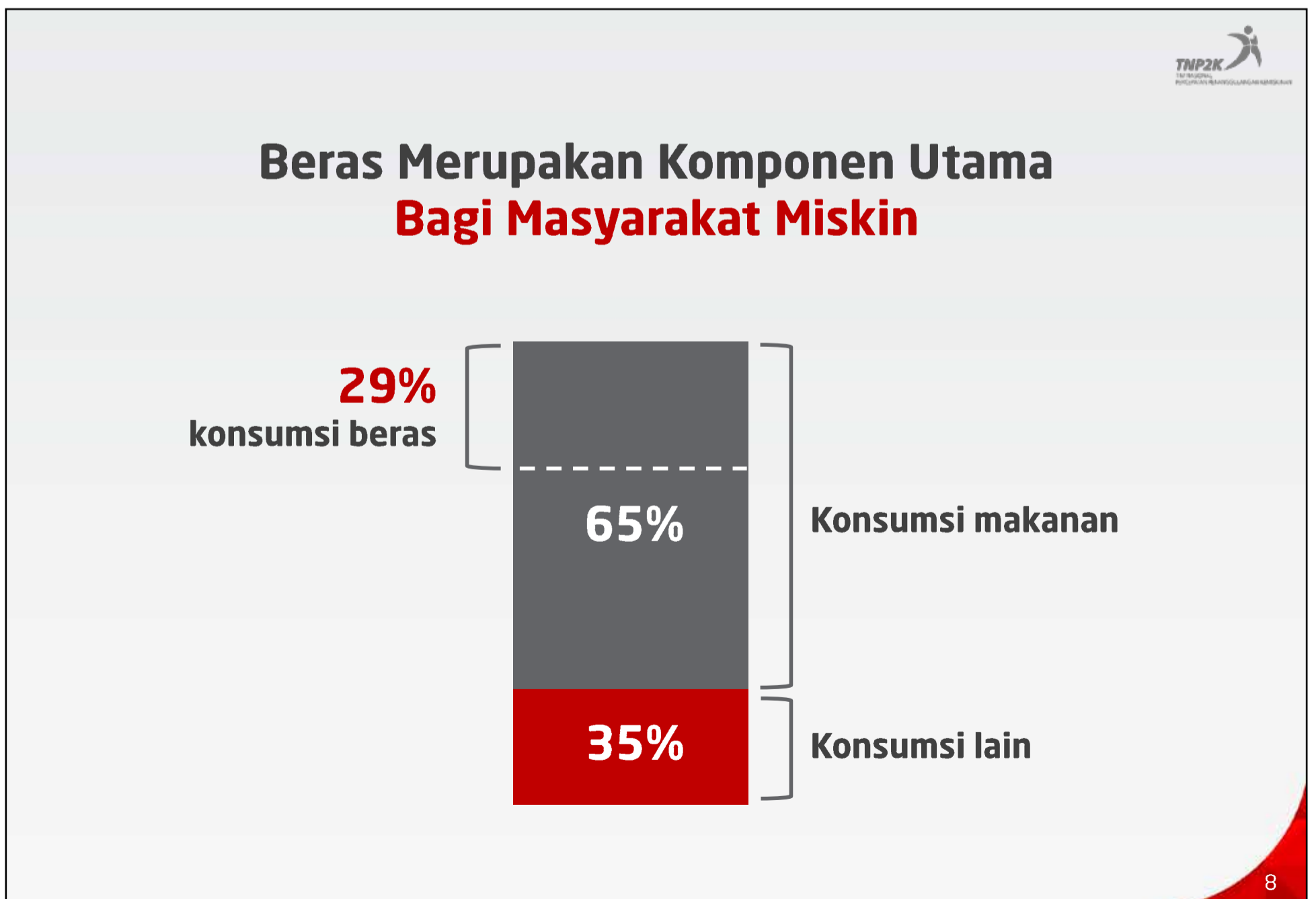
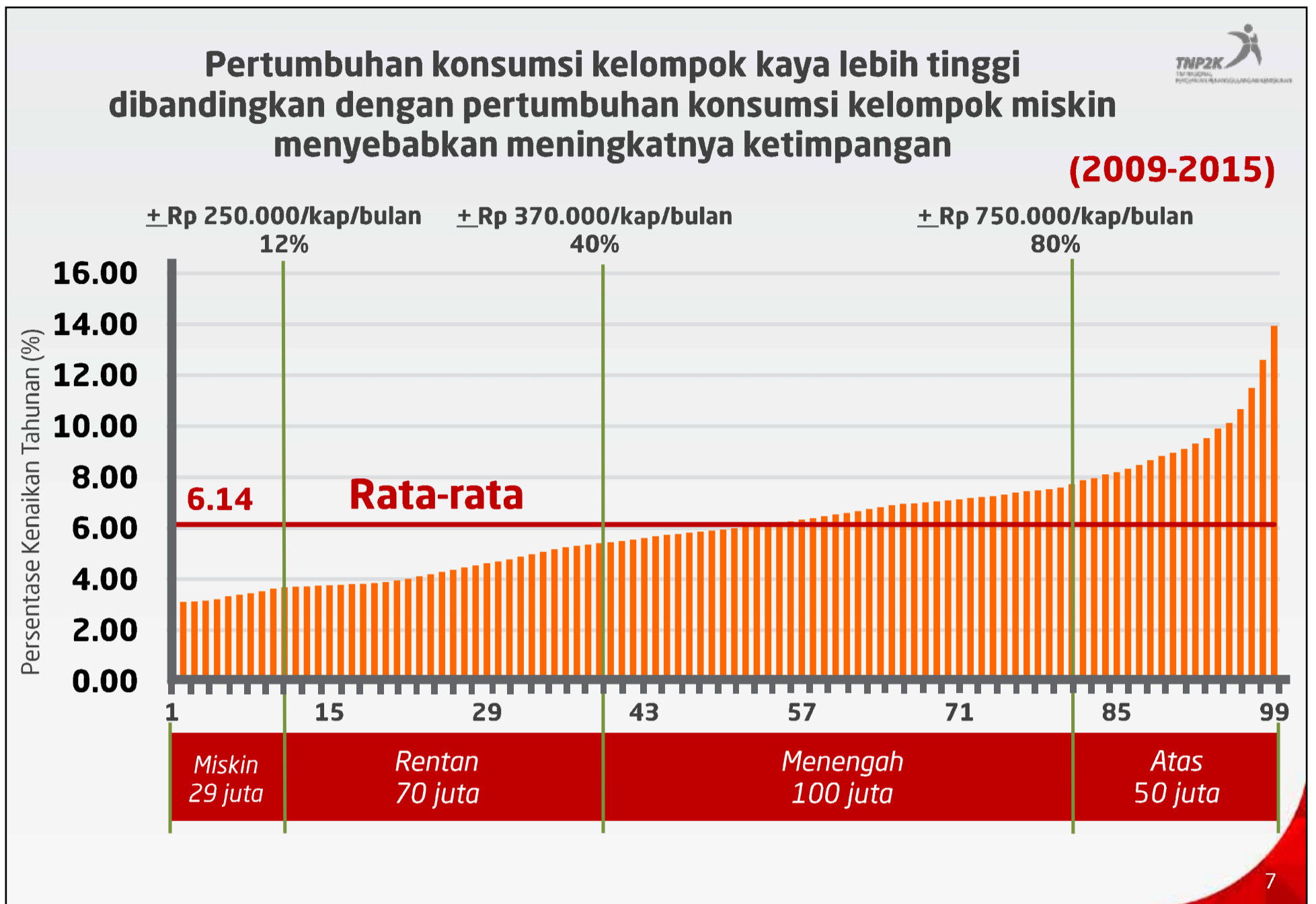
## Perkembangan Garis Kemiskinan dan Inflasi Periode September 2014 - September 2015

	SEPT 2014	SEPT 2015
<b>GARIS KEMISKINAN (Rp./kapita/bulan)</b>	<b>312.328</b>	<b>344.809</b>
<b>PERUBAHAN (%)</b>		<b>9,42</b> (Sept. 2014 s/d Sep. 2015)
<b>INFLASI NASIONAL (%)</b>		<b>6.83</b> (Sept. 2014 s/d Sept. 2015)

Sumber : BPS, 2016

4







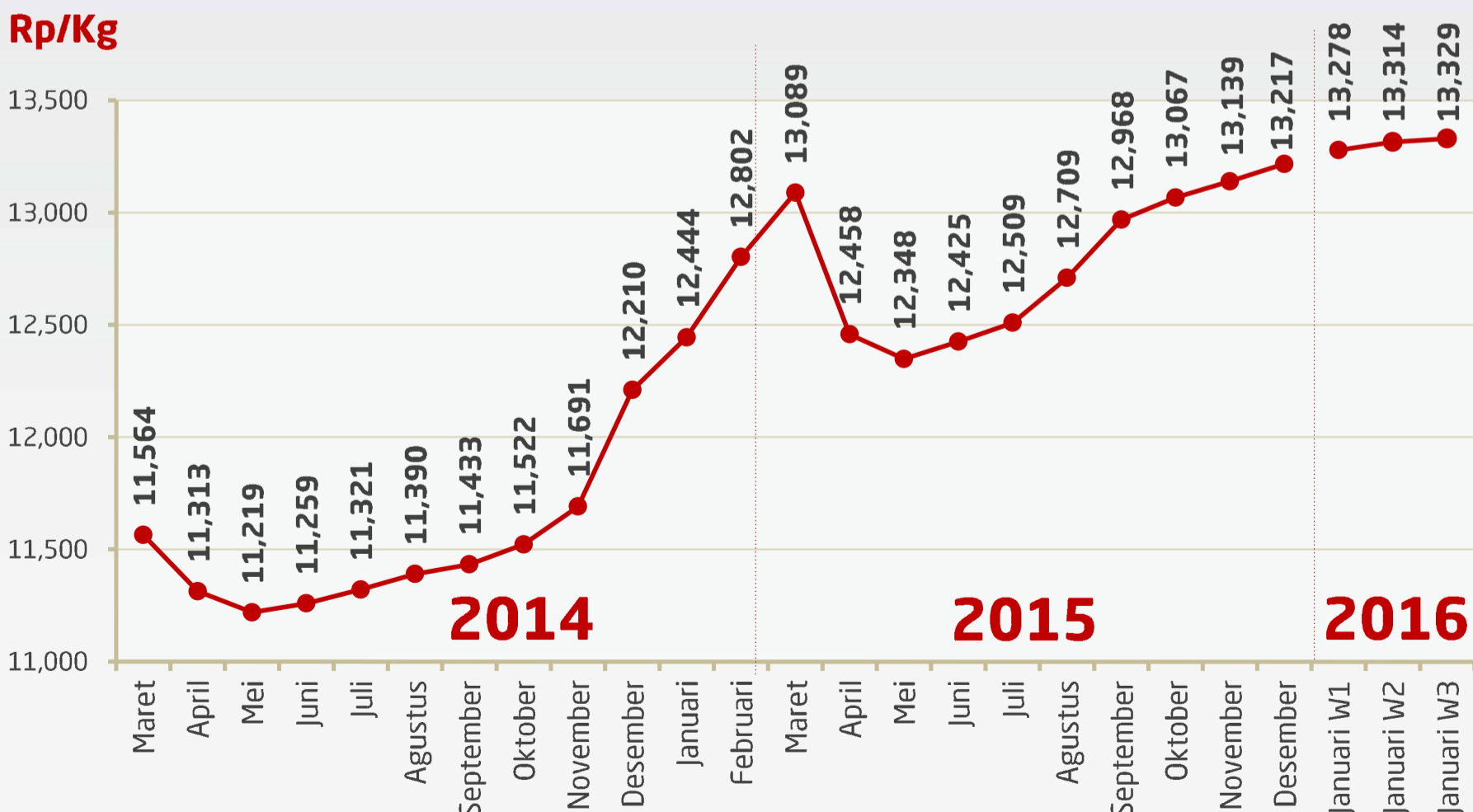
## Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Perubahan Jumlah Penduduk Miskin

Kenaikan Harga Beras	Penambahan Jumlah Penduduk Miskin
10 %	330.031
20 %	660.062
30 %	990.093
40 %	1.320.123

**CATATAN:**

- 1) Bobot bahan makanan dalam garis kemiskinan sekitar 65%
- 2) Bobot konsumsi beras dalam garis kemiskinan sekitar 26%
- 3) Peningkatan harga beras sebesar 10% berpotensi meningkatkan:
  - Inflasi sebesar 0,9 titik persen (langsung dan tidak langsung).
  - Angka kemiskinan sekitar 1,3 titik persen.
- 4) Diasumsikan pertumbuhan pengeluaran per kapita riil 5%.

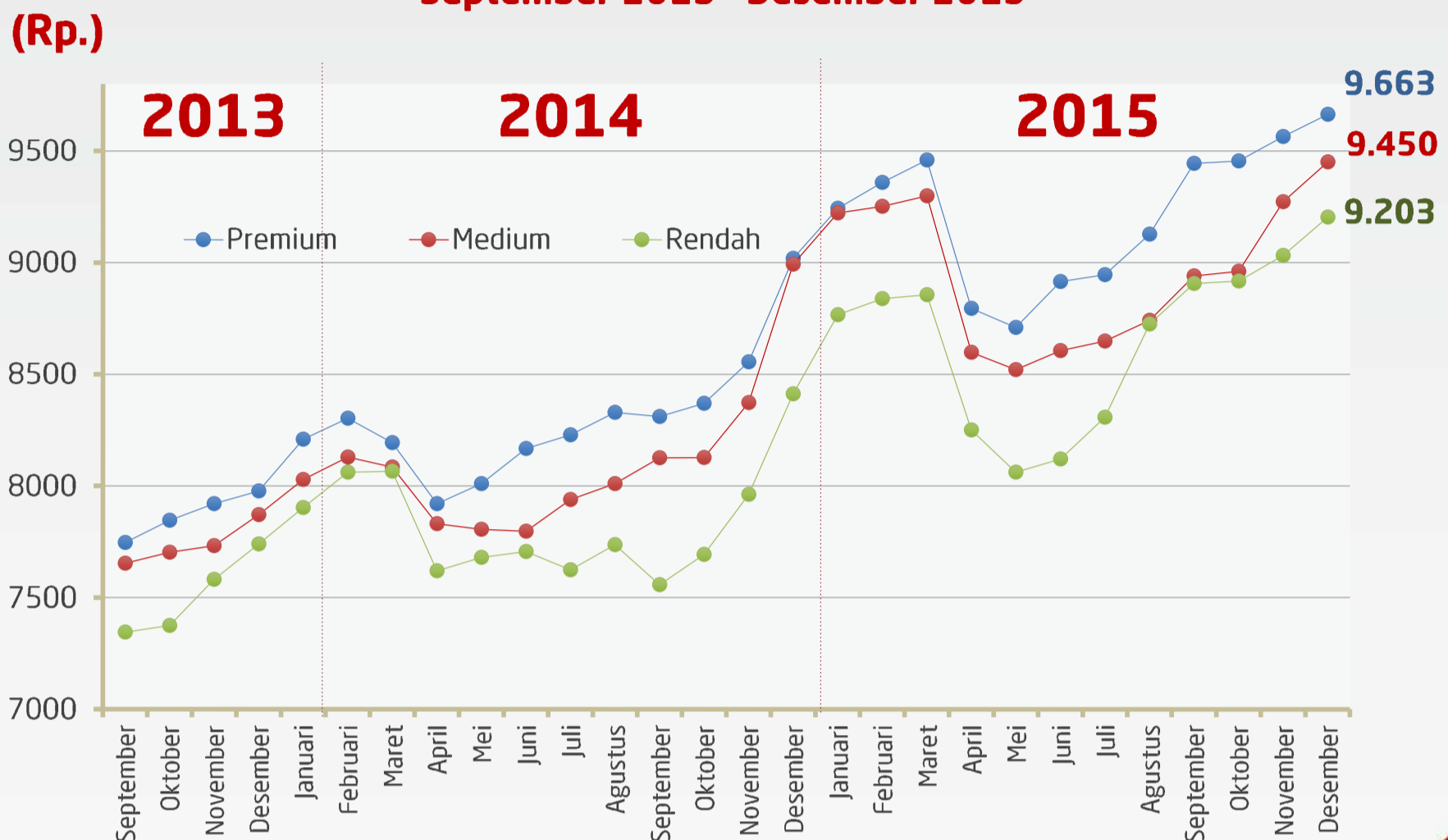
## Perkembangan Harga Beras/Kg Maret 2014 - Januari 2016



Sumber: BPS, 2015

## Rata-Rata Harga Beras/Kg Di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas

September 2013 - Desember 2015



11

## Empat pendorong utama ketimpangan di Indonesia yang mempengaruhi hidup generasi masa kini maupun masa depan

- Ketimpangan peluang sejak awal hidup
- Pekerjaan yang tidak merata
- Tingginya konsentrasi kekayaan
- Ketahanan ekonomi rendah

Sumber: Bank Dunia 2015

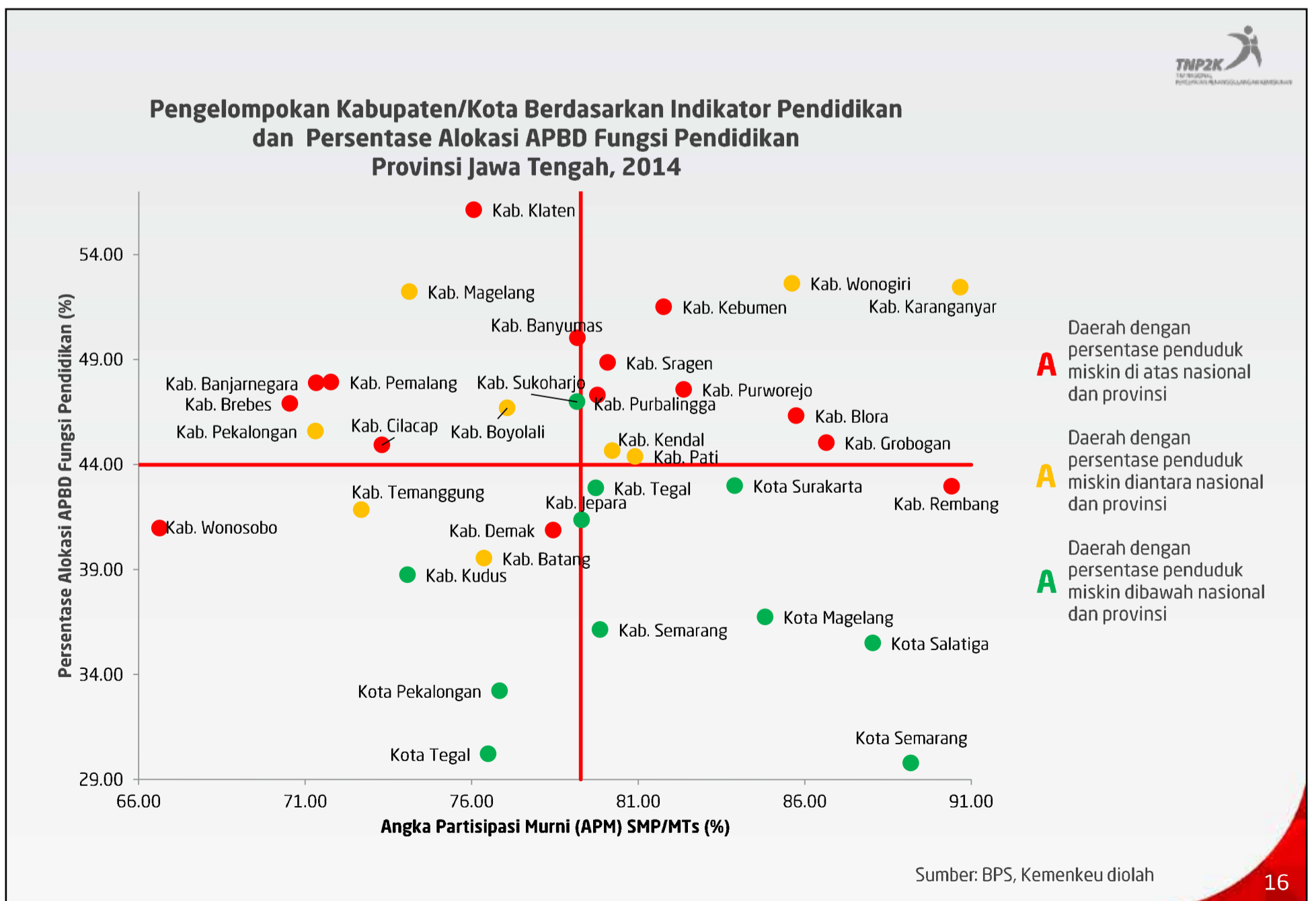
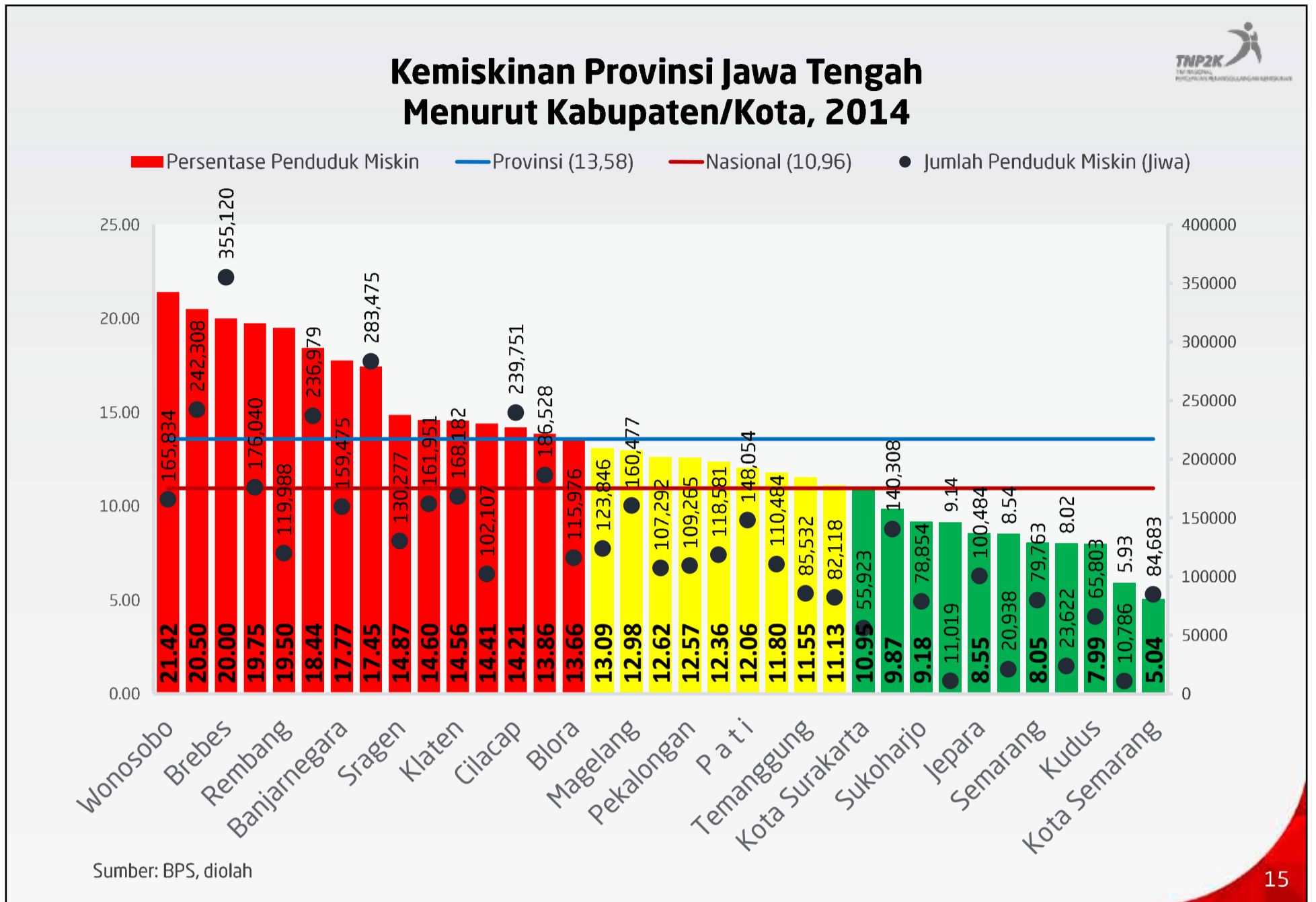
12



## Penajaman Alokasi Anggaran Pembangunan di Pusat dan Daerah Untuk Mengurangi Ketimpangan

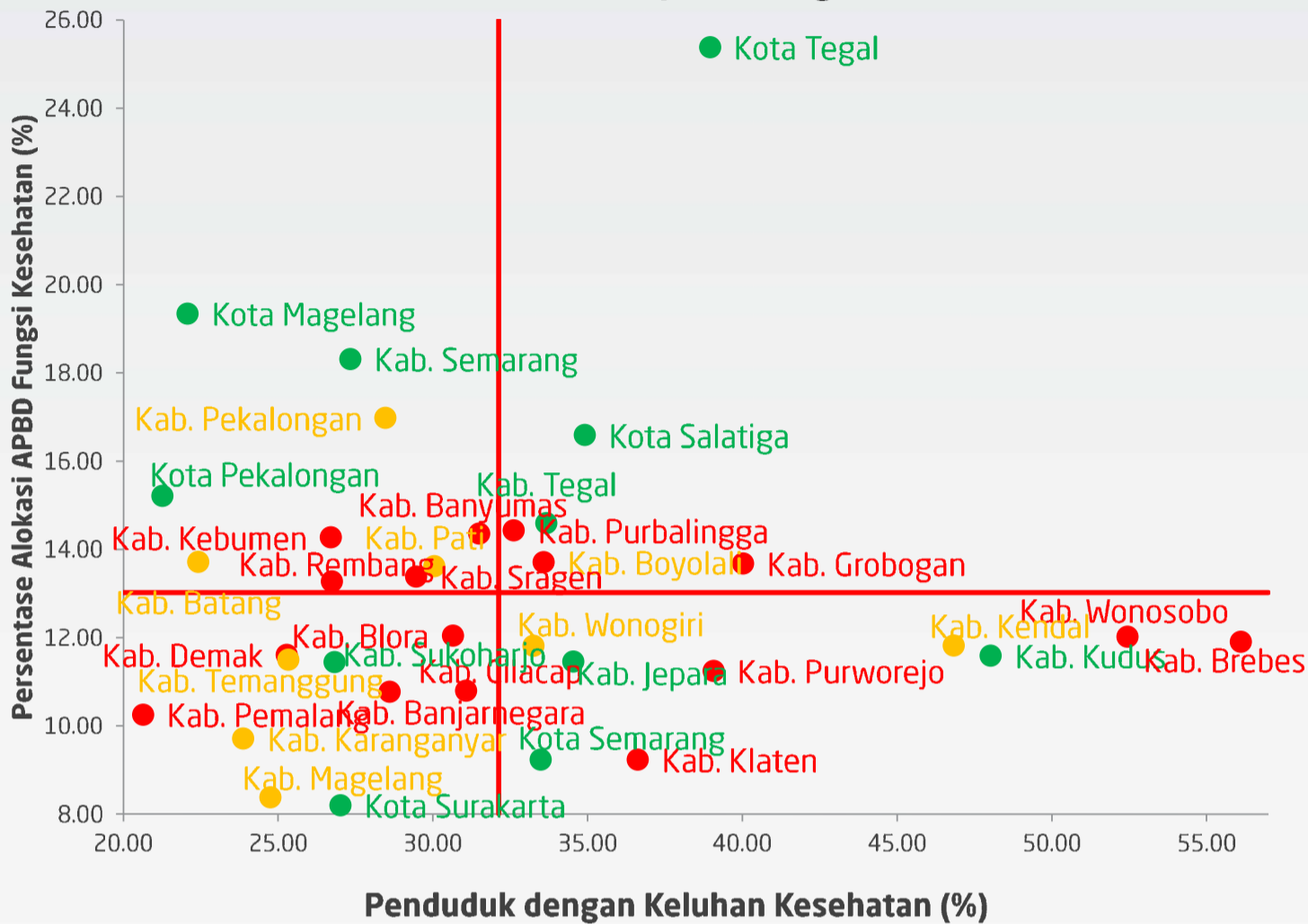
### Arti Penting Penajaman dan Sinergi Penganggaran

- Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan secara efektif perlu upaya yang sinergis dan fokus
- Saat ini BDT telah dimanfaatkan oleh banyak K/L maupun pemerintah daerah sebagai data penerima manfaat maupun instrumen perencanaan program lainnya.
- Upaya lain yang juga dapat dilakukan adalah pemanfaatan data tingkat nasional menyangkut kondisi sosio-ekonomi rumah tangga Indonesia sebagai alat identifikasi permasalahan pembangunan.
- BDT dan tool perencanaan pembangunan ini jika didorong sebagai platform perencanaan dan penganggaran berpotensi meningkatkan efektifitas program dan kebijakan pembangunan.





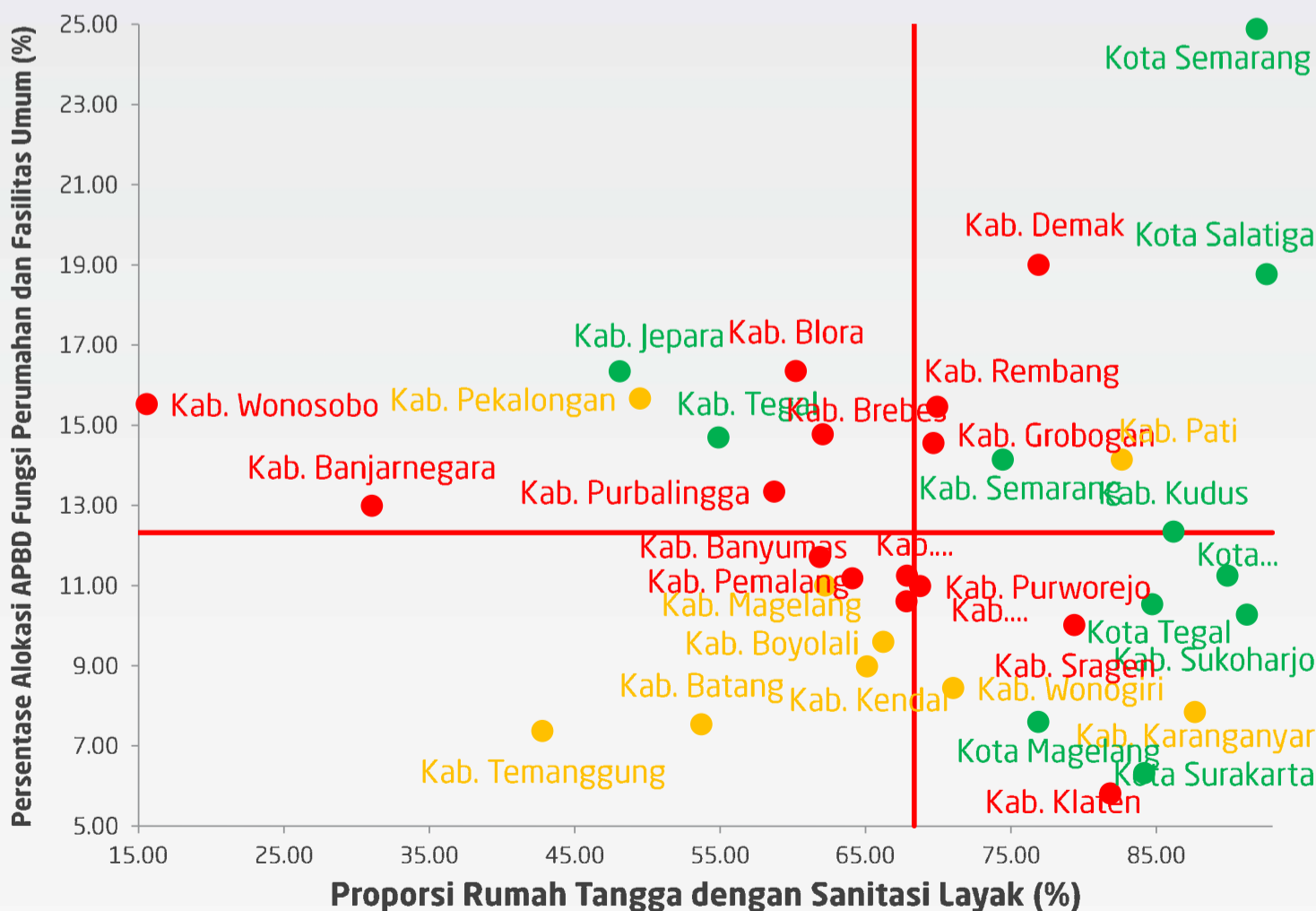
**Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Kesehatan dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2014**



- A** Daerah dengan persentase penduduk miskin di atas nasional dan provinsi
- A** Daerah dengan persentase penduduk miskin diantara nasional dan provinsi
- A** Daerah dengan persentase penduduk miskin dibawah nasional dan provinsi

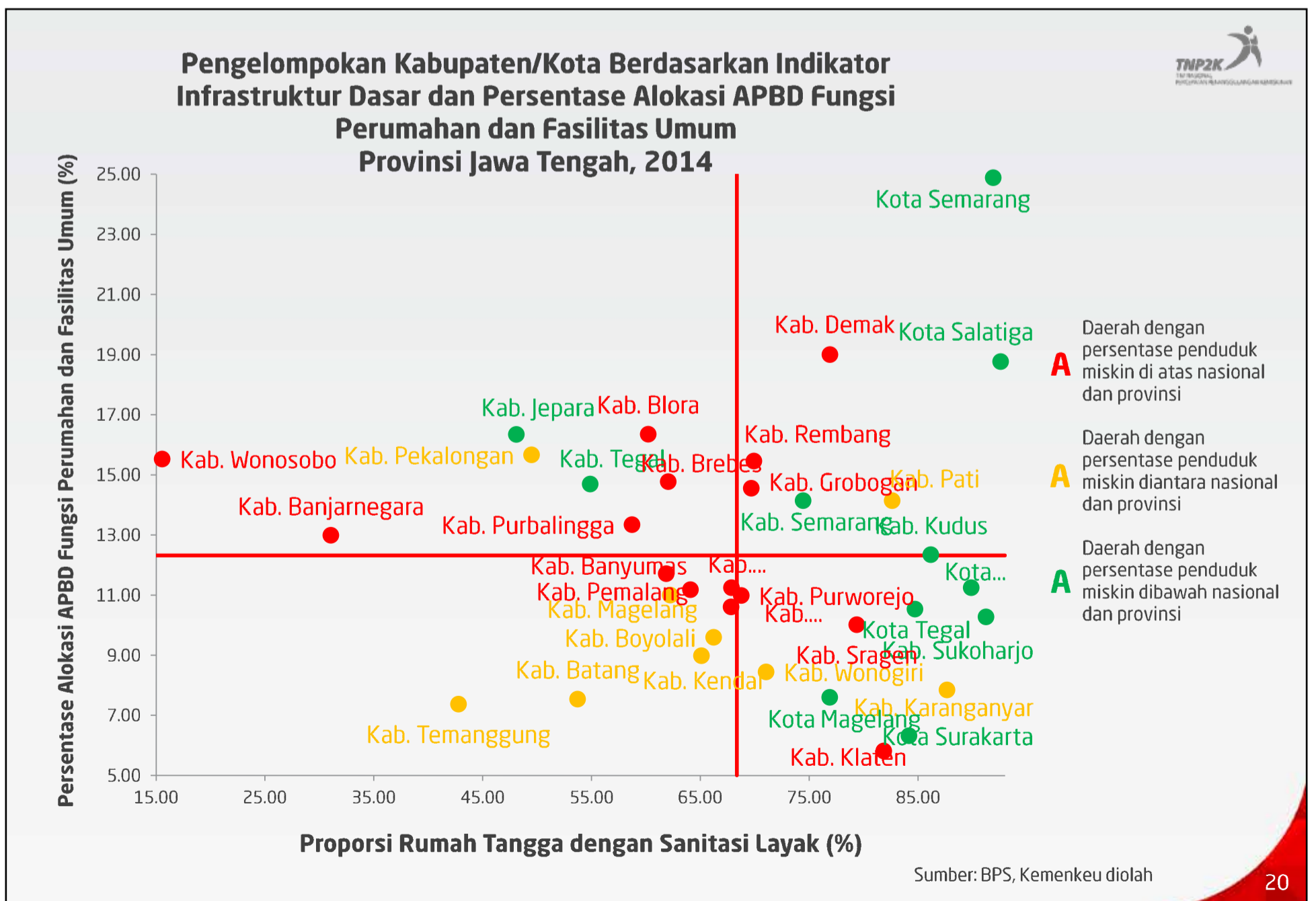
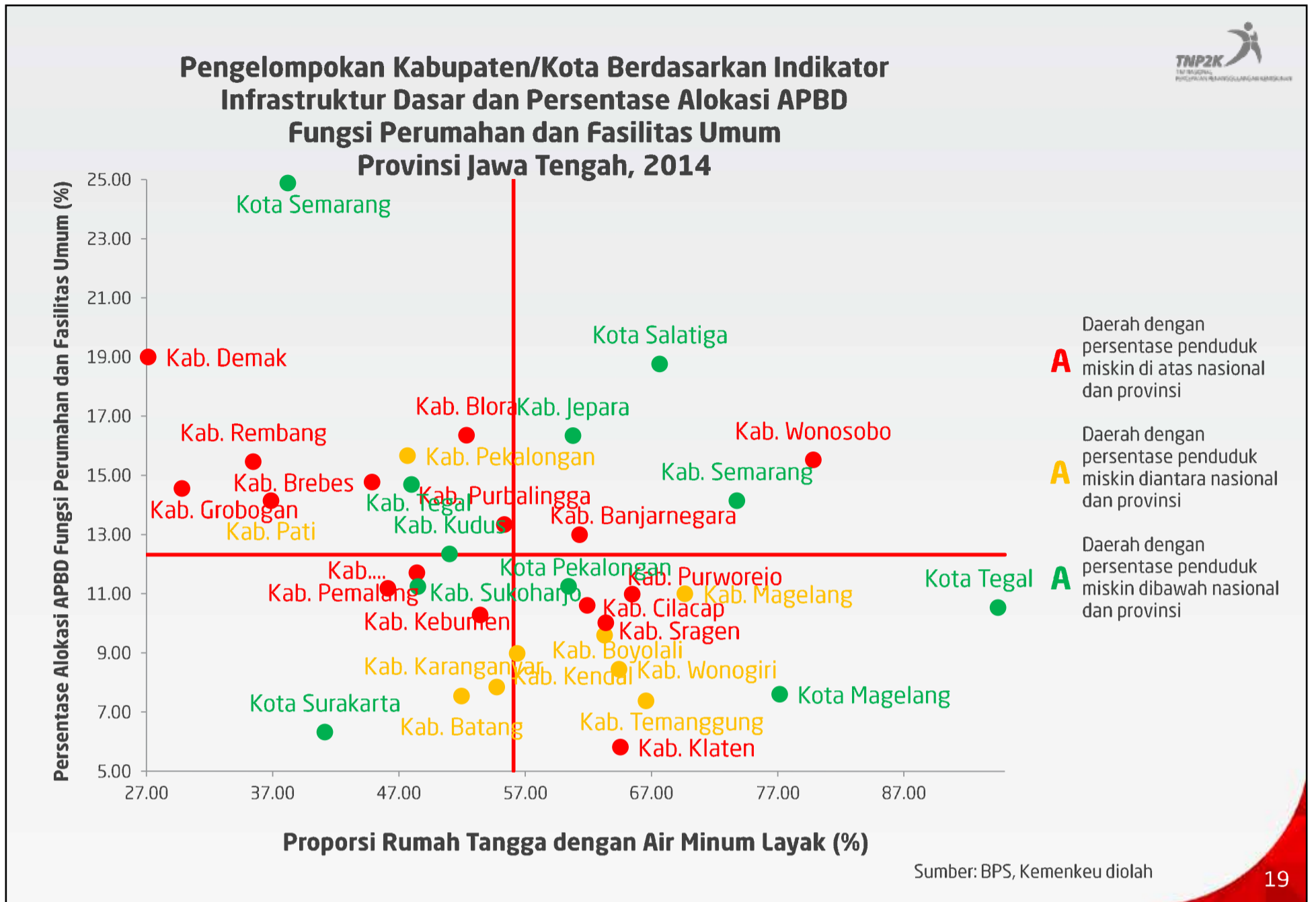
Sumber: BPS, Kemenkeu diolah

**Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Infrastruktur Dasar dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Provinsi Jawa Tengah, 2014**



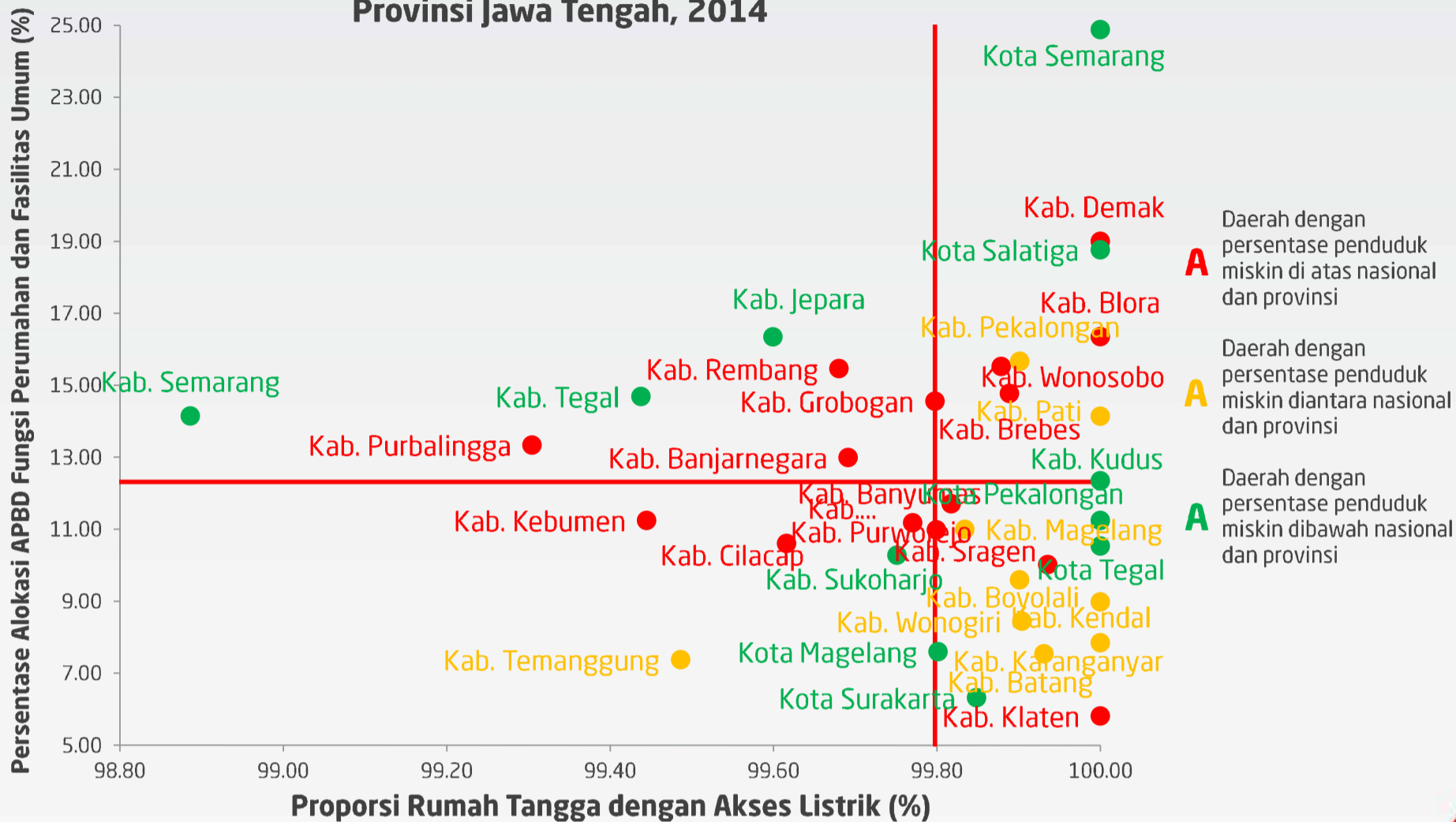
- A** Daerah dengan persentase penduduk miskin di atas nasional dan provinsi
- A** Daerah dengan persentase penduduk miskin diantara nasional dan provinsi
- A** Daerah dengan persentase penduduk miskin dibawah nasional dan provinsi

Sumber: BPS, Kemenkeu diolah





**Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Infrastruktur Dasar dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Provinsi Jawa Tengah, 2014**



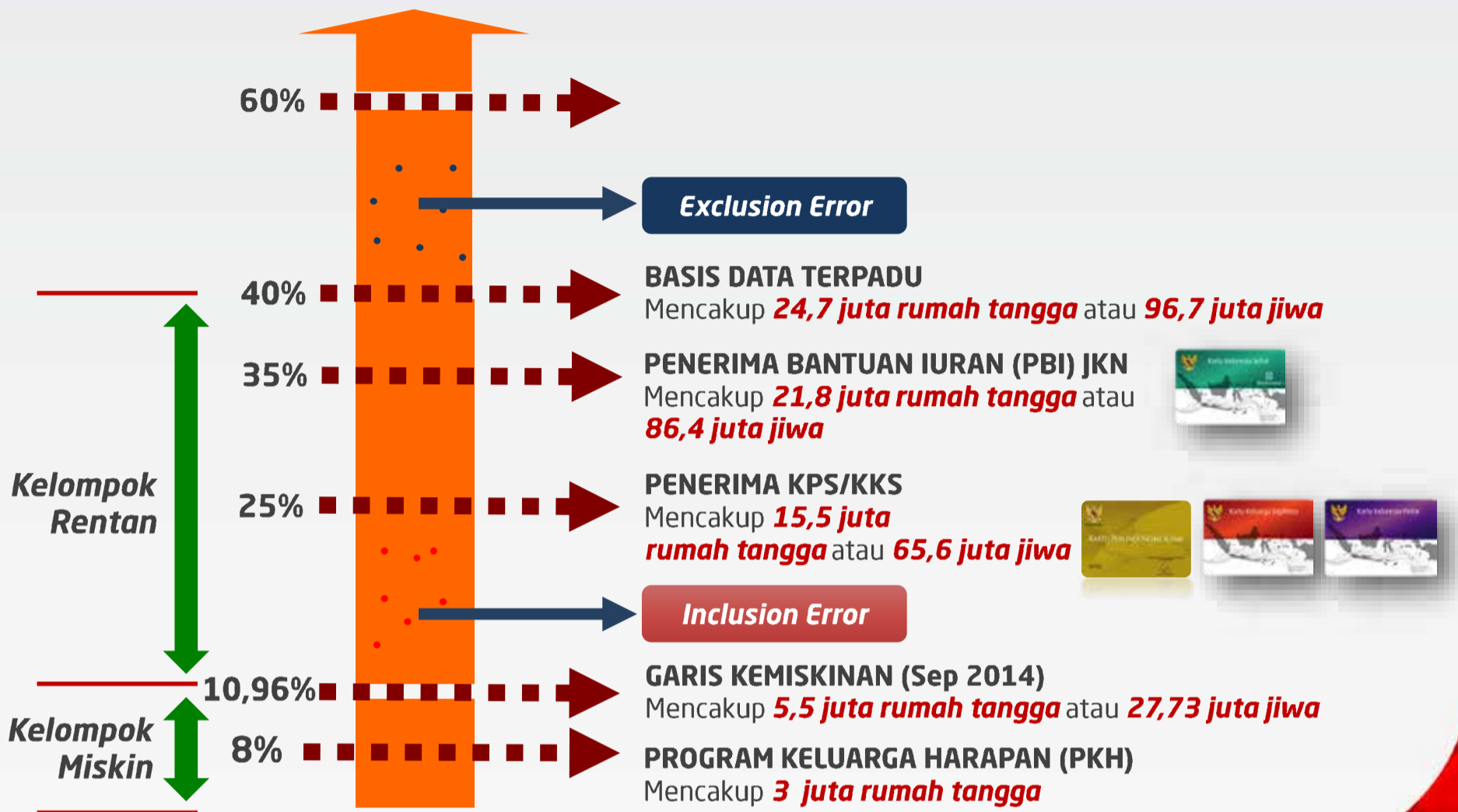
Sumber: BPS, Kemenkeu diolah



**Pengembangan Sistem Pensasaran Nasional untuk Program Perlindungan Sosial**



## Basis Data Terpadu (BDT) Sebagai Sumber Data Tunggal Program Perlindungan Sosial



## Layanan dan Dukungan pada K/L dan Daerah Dalam Memanfaatkan Data Penerima Manfaat (1)



## Layanan dan Dukungan pada K/L dan Daerah Dalam Memanfaatkan Data Penerima Manfaat (2)

### 1 Menyediakan Data dan Dukungan Teknis Pemanfaatannya

- Memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkan oleh program perlindungan sosial, dengan bekerja sama dengan penyelenggara program
- Memberi dukungan teknis kepada pengguna Basis Data Terpadu

### 2 Melakukan Riset dan Monev Pemanfaatan Data

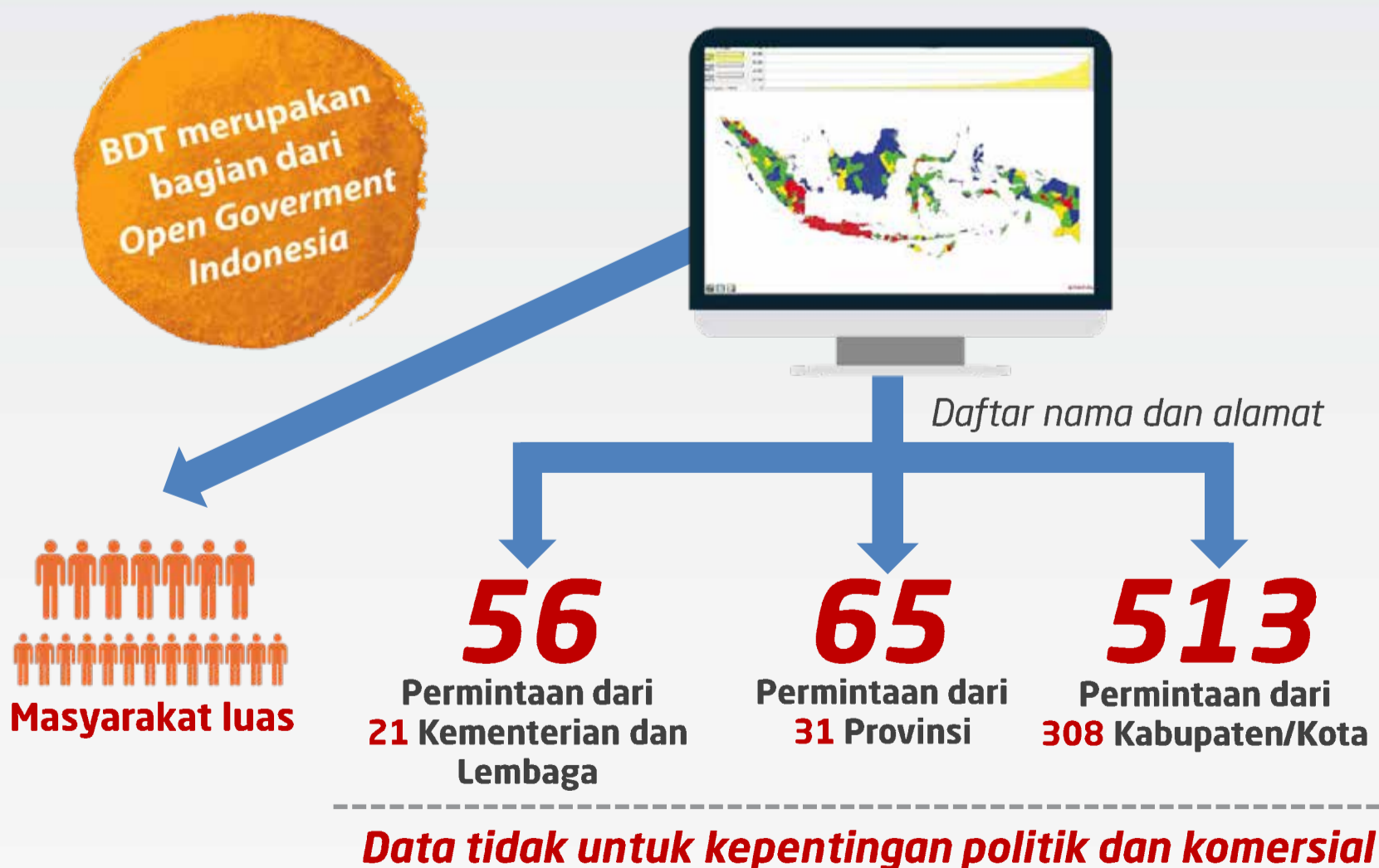
- Memastikan kesahihan berbagai studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Basis Data Terpadu

### 3 Dukungan Teknis Pengembangan MIS Penerima Manfaat di K/L dan Daerah

- Manajemen Basis Data Terpadu berbasis teknologi informasi
- Penyajian beragam informasi dari basis data terpadu melalui media berbasis teknologi informasi

25

## Pengguna Data Penerima Manfaat



26



## Amanat UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

- Menteri Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
- Menteri Sosial menetapkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagai dasar penentuan pemberian bantuan sosial

27



## Arahan Menteri Sosial

- Dalam masa transisi memenuhi mandat UU 13/2011, Sekretariat TNP2K akan mendukung penuh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial
  - Melakukan sinergi basis data melalui pengolahan dan penyiapan bersama, oleh Pusdatin Kementerian Sosial dengan Sekretariat TNP2K
  - Memberikan layanan dan asistensi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang membutuhkan data penerima manfaat dilakukan bersama oleh Pusdatin Kementerian Sosial dan Sekretariat TNP2K

28



## Penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa 2016

### Potensi Masalah yang Perlu Diantisipasi TA 2016

#### 1. Penyaluran Dana Desa dari Pusat ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Desa

- a) Formula perhitungan alokasi Dana Desa:
    - 90% dialokasikan secara merata
    - 10% dialokasikan menggunakan formula

➔ Pembagian secara merata tidak mencerminkan kebutuhan masing-masing desa
  - b) PMK 247/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Syarat penyaluran:
- Bupati menyampaikan laporan kepada Kemenkeu:
    - Penyaluran Dana Desa minimal 50% telah tersalurkan
    - Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa
  - Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa minimal 50% Dana Desa telah dimanfaatkan kepada Kabupaten
  - Pada tahun 2017 penyaluran Dana Desa mensyaratkan SILPA penggunaan Dana Desa di tingkat desa < 30%
- ➔ Berpotensi memperlambat penyaluran
- ➔ Dilain pihak, ditenggarai adanya Dana Desa yang mengendap di tingkat Kabupaten

## Proses Penyusunan APBDES Sesuai UU 6/2014, PP 43/2014 dan Permendagri 114/2014



31

## Potensi Masalah yang Perlu Diantisipasi TA 2016

### 2. Pemanfaatan Dana Desa (Di tingkat Desa)

Agar Dana Desa dimanfaatkan dengan baik diperlukan:

#### a) Peningkatan Kapasitas:

- Perangkat desa (Pelatihan dilakukan oleh Kemendagri)
- Pendamping (Pelatihan dilakukan oleh Kemendes)

#### b) Pelaksanaan pendampingan:

- **Kepada perangkat desa**  
Bimbingan dilakukan oleh aparat kabupaten/kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa
- **Kepada kelompok masyarakat desa**  
Bimbingan dilakukan oleh perangkat desa, pendamping desa dan pendamping lokal desa

32

## Potensi Masalah yang Perlu Diantisipasi TA 2016

### c) Perekrutan pendamping (PP 47/2015 dan Permendesa No. 3/2015):

- Pendamping Desa berkedudukan di kecamatan (Dapat menggunakan pendamping eks-PNPM)
- Pendamping Lokal Desa berkedudukan di desa (Direkrut baru secara terbuka)
- Desa dapat merekrut kader desa sebagai pendamping

### d) Perlakuan Dana Desa sebagai bagian dari APBDes

Tata kelola penggunaan Dana Desa termasuk pertanggungjawaban diperlakukan sebagai pos belanja sehingga mengikuti aturan pertanggungjawaban APBDes. Sementara pelaporan penggunaan Dana Desa cukup dibuat sederhana sesuai dengan PMK 247/2015.

33

## Potensi Masalah yang Perlu Diantisipasi TA 2016

### e) Terdapat dua Regulasi yang Mengatur Prioritas Pemanfaatan Dana Desa

#### 1. Permendagri 114/2014, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:

- Penyelenggaraan pemerintahan Desa,
- Pelaksanaan pembangunan Desa,
- Pembinaan kemasyarakatan Desa,
- Pemberdayaan masyarakat Desa,

#### 2. Permendesa 5/2015, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:

- Pembangunan dan
- Pemberdayaan masyarakat desa.

34

## Contoh APBDes Desa Kuta

URAIAN	Rp.	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.559.212.391</b>	
Pendapatan Asli Desa		0%
Hasil Kekayaan Desa		0%
Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong		0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		0%
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.559.212.391</b>	
Dana Desa	334.138.708	21%
Bagian dari hasil pajak Kabupaten	297.072.707	19%
Bagian dari hasil retribusi Kabupaten	76.218.493	5%
Alokasi Dana Desa	833.782.483	53%
Bantuan Keuangan dari Kabupaten	18.000.000	1%

- Total pendapatan Desa Kuta TA 2015 adalah sebesar Rp 1,6 milyar yang terdiri dari berbagai sumber pendapatan sbb:
  - Alokasi Dana Desa (53%)
  - Dana Desa (21%)
  - Bagian dari hasil pajak kabupaten (19%)
- Belanja desa didominasi untuk bidang pembangunan desa sebesar 66%, bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar 31%, sedangkan untuk pembinaan masyarakat sebesar 3%. Belum ada alokasi belanja untuk Bidang pemberdayaan masyarakat.

35

## Rekomendasi

- Diutamakan pemanfaatan formula untuk alokasi Dana Desa agar mencerminkan kebutuhan Desa**
- Diperlukan SKB Mendagri, Menkeu, dan Mendesa:**
  - Agar penyaluran Dana Desa tidak terhambat oleh persyaratan minimal penyaluran dan pemanfaatan sebesar 50%
  - Karena Dana Desa merupakan bagian dari APBDes, diperlukan petunjuk bersama agar pelaporan penggunaan Dana Desa yang disyaratkan oleh Kemenkeu dapat dipenuhi sesuai dengan PMK 247/2015, walaupun pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Desa sebagai bagian dari APBDes tetap dilakukan pada akhir tahun anggaran
  - Memperjelas peran perangkat desa dan pendamping desa terkait dengan pemanfaatan Dana Desa
- Diperlukan koordinasi antara Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendes untuk:**
  - Penyelarasan materi pelatihan perangkat desa dan pendamping desa,
  - Penyelarasan waktu penyelenggaraan pelatihan perangkat desa dan pendamping desa
  - Menghasilkan pedoman teknis tunggal tentang mekanisme dan tata kelola pemanfaatan dana desa
- Kemendes:**
  - Segara merekrut pendamping sebelum penyaluran Dana Desa tahap I T.A 2016
  - Segara melatih perangkat desa dan pendamping sebelum penyaluran Dana Desa tahap I T.A 2016
  - Memperjelas tugas dan kewenangan pendamping desa dan pendamping lokal desa

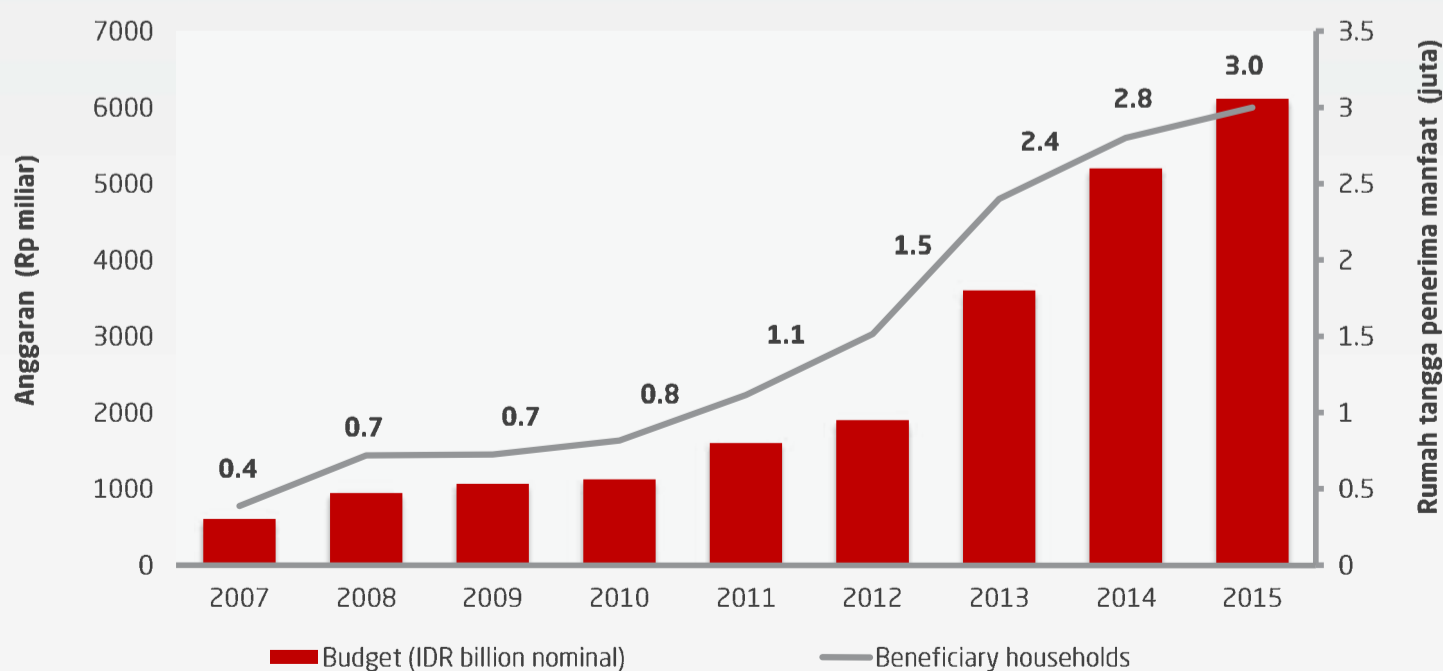
36



## Perluasan Program Keluarga Harapan

## CCT Indonesia: Program Keluarga Harapan

- Mengikuti praktik terbaik dari negara lain, Indonesia mulai menerapkan PKH pada tahun 2007.
- Evaluasi dampak atas program ini telah dilakukan pada tahun 2010 dan 2013 menunjukkan dampak program yang positif pada peningkatan kesejahteraan, perilaku dan *outcomes* kesehatan dan pendidikan.
  - Ruang perbaikan masih cukup besar menjadi dasar peningkatan program selanjutnya.
- CCT berkembang pesat baik dari segi anggaran maupun cakupan sejak 2012



Sumber: Bappenas, Kemenkeu 2014



## Hasil Dampak PKH

### PENDIDIKAN

PKH meningkatkan angka partisipasi sekolah di tingkat SD sebesar 2,3 titik persentase dan SMP meningkat 9,5 titik persentase.

PKH juga meningkatkan tingkat kehadiran anak di tingkat SD sebesar 1,3 titik persentase dan SMP 0,8 titik persentase. Rendahnya dampak pada tingkat kehadiran dikarenakan tingkat kehadiran sebelum program sudah cukup tinggi

### KESEHATAN

Secara umum PKH meningkatkan proporsi ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan sebesar 7,1 persen,

PKH juga meningkatkan kegiatan imunisasi balita. Anak Peserta PKH memiliki kemungkinan mendapat imunisasi 7 titik persentase lebih tinggi dari kelompok bukan Peserta.

Akan tetapi dampak jangka panjang PKH belum terlihat pada kunjungan paska kelahiran dimana tidak terlihat perbedaan perilaku pada Peserta PKH maupun bukan Peserta.

### KONSUMSI RUMAH TANGGA

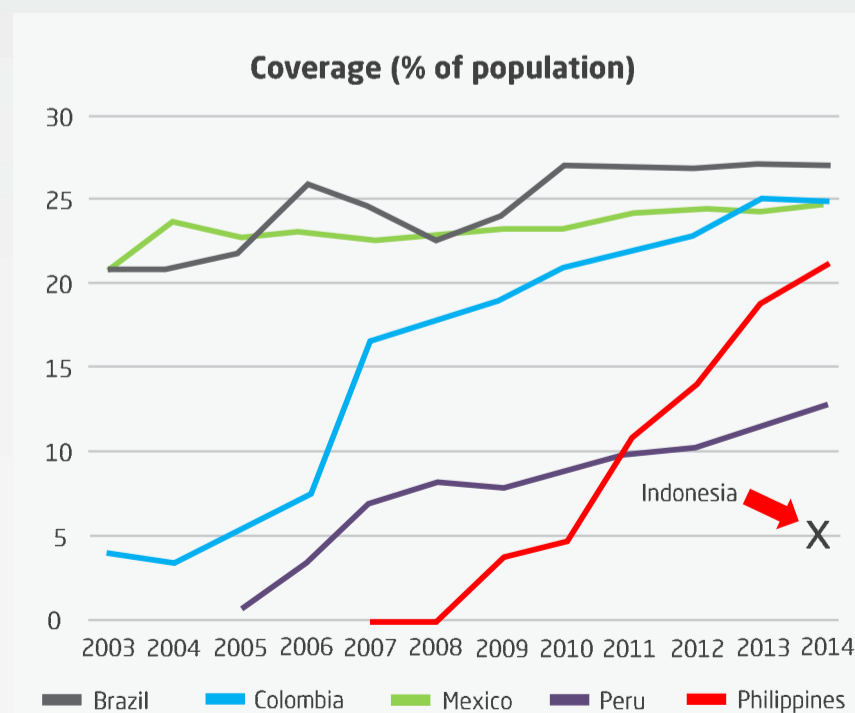
PKH meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 4,8 persen, dimana sebagian besar terefleksi pada pengeluaran untuk pendidikan yang meningkat 15,4 persen.

Note: Studi dilakukan 360 kecamatan di 6 Provinsi wilayah PKH Kohor 2007

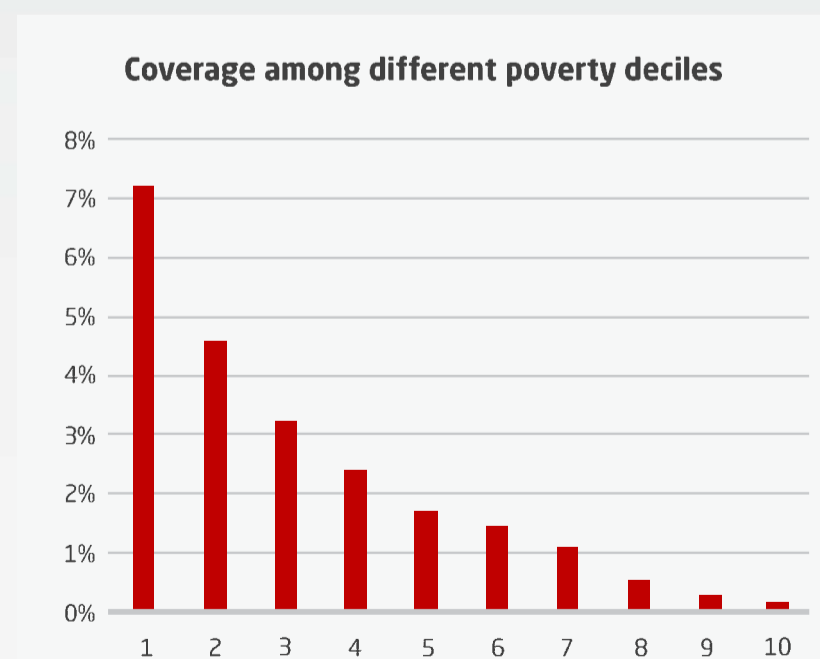


## PKH berpotensi untuk mengatas permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. Namun ukuran programnya (cakupan dan nilai manfaat) saat ini masih terlalu kecil untuk tujuan tersebut.

- Cakupan dari populasi jauh lebih rendah dibandingkan CCT lain di seluruh dunia
- Hanya mencakup 7% dari 10% termiskin dari populasi



Sumber: World Bank



Sumber: Perhitungan World Bank berdasarkan Susenas 2014

## Tantangan Utama Perluasan PKH Mencapai 20 Juta Keluarga

1. Memastikan keluarga Peserta PKH mengetahui kondisionalitas program
2. Memastikan agar verifikasi pemenuhan kondisionalitas dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip bantuan tunai bersyarat
3. Memastikan agar penalti diterapkan atas ketidakpatuhan terhadap pemenuhan kondisionalitas
4. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga di Pusat dan dengan SKPD di Daerah
5. Meningkatkan kapasitas organisasi UPPKH
6. Memastikan ketersediaan dan kesiapan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah perluasan cakupan

41

**Terima kasih**



